

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darus Badruzaman, Mariam, 2004, *Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartanto, J. Andy, 2020, *Hukum Pertanahan, Hukum Jaminan dan Hukum Perusahaan*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Salim, H, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J., 2004, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

- Agustia, Tria, *et.al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Objek Yang Belum Terdaftar”, *De Legalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020
- Amirtin, Aulia Rachman, "Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Dengan Akta Notaris Berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) Perkaban No. 8 Tahun 2012 Dikaitkan Dengan Pasal 38 Uujn No. 30 Tahun 2004 Dalam Melindungi Hak Kreditor." *Premise Law Journal*, vol. 13, 2015.
- Badriyah, Siti Malikhatun, “Problematika Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Objek Tanah yang Belum Bersertifikat”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 3, Juli 2016.
- Bur, H. Arifin, Desi Apriani, “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”, *UIR Law Review*, Vol.01, No.02, Oktober 2017.

- Cahyani, Sri Endah, “Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tanpa Diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No.1, Februari 2019.
- Cahyo Setiono, Gentur, “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)”, *Transparansi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018.
- Ditya Argo Putra, Oky, “Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah”, *Repertorium*, Vol. 1, No.1, Juni 2014.
- Fitri, Azzizah Amatullah, *et. al*, “Tanggung Jawab Keperdataan Dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Notaris yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/PDT.G/2016/PN.SBY)”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Golonda, Dhanty Ayudita, “Fungsi Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan”, *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 7, September 2017.
- Ham, Nadya Tahsya Rachmasari, “Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote yang Dikeluarkan yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank”, *Indonesian Notary*, Vol. 2, No. 4, 2020.
- Harinata, Surya, “Akibat Hukum Lewatnya Batas Waktu Kewajiban Mendaftarkan APHT Oleh PPAT”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3, No. 2, September 2014.
- Imron, Abdul Kholiq, “Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- Kadir, Rahmiah, *et al*, “Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Cover Note”, *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, Juni 2019.
- Khoirul Huda, Mokhamad dan Ninis Nugraheni, “Perjanjian Jaminan Sebagai *Accessoir* Perjanjian Kredit”, *Dialogia Iuridica*, Vol. 6, No. 2, April 2015.
- Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, No. 1, Vo. 2, Januari 2017.

- Mardiyah, *Et. al*, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, April 2017.
- Miharjo, Rodeo Sudewo Pranoto, “Implikasi Nilai Hak Tanggungan di Dalam Pemberian Hak Tanggungan”, *Jurnal Education and Development*, Vol.9, No. 2, Juli 2011
- Prasastinah Usanti, Trisadini, “Lahirnya Hak Kebendaan”, *Perspektif*, Vol. 17, No. 1, Januari 2012.
- Regita A. Mumek, “Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 2, Maret 2017.
- Setiono, Guntur Cahyono, “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018.
- Sundah, Fadhilah, Jawade Hafidz, “Implementasi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Hak Tanggungan Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Akta yang Telah Dibuat Oleh Notaris”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 2, Juni 2017.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi, “Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Asas Publisitas Dalam Proses Hak Tanggungan”, *Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4, Desember 2017.
- Wiwoho, Jamal, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 1, Januari 2014.

Hasil Penelitian

- Anindita, 2011, *Tinjauan Tentang Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Permana, Rima Dian, 2017, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Covernote yang Dibuat Sebagai Jaminan Pengganti Atas Utang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Lisbenk Pestisia, Agmona, 2016, *Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) dalam Pembuatan SKMHT dan Akta Pemberian Hak*

Tanggungun (APHT) Guna Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo.

Tjiatawi, Ulim, 2018, *Tinjauan Yuridis Pembebanan Hak Tanggungan Yang Dilakukan Dengan SKMHT*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).